

Syafarudin, Maulana Mukhlis
(Editor)

DISRUPSI

PEMERINTAHAN & POLITIK

ERA 4.0

(Catatan Akademisi FISIP Universitas Lampung)



Ari Darmastuti | Arizka Warganegara | Andy Corry Wardhani
Budi Kurniawan | Dedy Hermawan | Maulana Mukhlis
Robi Cahyadi Kurniawan | Simon S. Hutagalung
Syamsul Ma'arif | Syafarudin

Ilustrasi digital (SHUTTERSTOCK)

DISRUPSI PEMERINTAHAN & POLITIK ERA 4.0

(Catatan Akademisi FISIP Universitas Lampung)

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

DISRUPSI PEMERINTAHAN & POLITIK ERA 4.0

(Catatan Akademisi FISIP Universitas Lampung)

Syafarudin, Maulana Mukhlis
(Editor)

Ari Darmastuti | Arizka Warganegara | Andy Corry Wardhani
Budi Kurniawan | Dedy Hermawan | Maulana Mukhlis
Robi Cahyadi Kurniawan | Simon S. Hutagalung
Syamsul Ma'arif | Syafarudin



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

DISRUPSI PEMERINTAHAN DAN POLITIK ERA 4.0
(Catatan Akademisi FISIP Universitas Lampung)

Penulis:

Ari Darmastuti, Arizka Warga negara, Andy Corry Wardhani,
Budi Kurniawan, Dedy Hermawan, Maulana Mukhlis,
Robi Cahyadi kurniawan, Simon S. Hutagalung,
Syamsul Ma'arif, Syafarudin

Editor :

Syafarudin, Maulana Mukhlis

Desain Cover & Layout

PusakaMedia Design

xiv + 207 hal : 14 x 21 cm

Cetakan April 2020

ISBN: 978-623-7560-71-5

Penerbit

PUSAKA MEDIA

Anggota IKAPI

No. 008/LPU/2020

Bekerjasama dengan:

FISIP Universitas Lampung

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100

Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung

082282148711

email : cspusakamedia@yahoo.com

Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Pengantar Editor

Disrupsi atau perubahan adalah sebuah keniscayaan. Hanya saja disrupsi itu bisa parsial atau ada yang dirasakan sudah menjadi disrupsi total atau fundamental. Gelombang disrupsi telah mewarnai segala aspek kehidupan warga (seperti di dunia bisnis, teknologi, sosial, budaya, pemerintahan, dan politik) di hampir tiap negara di dunia.

Disrupsi yang dipantik revolusi industri 4.0 ini, bila dilihat dari sejarah satu dasawarsa yang lalu kala ada pertemuan *Hannover Fair* Jerman 2011 dan dilanjutkan 2012 muncul rekomendasi *Working Group industry 4.0*. Itu semua berawal dari tuntutan, keinginan, dan kebutuhan warga dunia untuk memperoleh produk dan jasa yang *smart product* (efektif, efisien, dan multi fungsi) melalui *smart factory*.

Revolusi industri pada tahap ke-empat (era 4.0) ini adalah sebuah kondisi pada abad ke-21, ketika terjadi perubahan besar-besaran di berbagai bidang lewat perpaduan teknologi yang mengurangi sekat-sekat antardunia fisik, digital, dan biologi.

Revolusi ini ditandai dengan kemajuan teknologi kecerdasan buatan, robot, teknologi nano, komputer kuantum, bioteknologi, *internet of things*, percetakan 3D, dan kendaraan tanpa awak semisal *drone*.

Sebagaimana revolusi terdahulu, revolusi industri keempat dimata *netizen* berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat diseluruh dunia.

Namun, bak pisau bermata ganda kemajuan di bidang otomatisasi dan kecerdasan buatan ini telah menimbulkan kekhawatiran bahwa mesin-mesin suatu hari akan mengambil alih pekerjaan manusia. Selain itu, bila revolusi-revolusi sebelumnya masih dapat menghasilkan lapangan pekerjaan baru untuk menggantikan pekerjaan yang diambil alih oleh mesin, sementara kali ini kemajuan kecerdasan buatan dan otomatisasi dapat menggantikan tenaga kerja manusia secara keseluruhan yang digantikan oleh teknologi *robotic*.

Revolusi industri era 4.0 sebenarnya bisa dilihat juga sebagai perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar kebutuhan pokok dengan keinginan masyarakat. Perjalanan perubahan dalam revolusi yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa kekerasan dan atau melalui kekerasan. Dasar perubahan ini sebenarnya adalah pemenuhan hasrat keinginan terhadap pemenuhan kebutuhan manusia secara cepat dan berkualitas. Revolusi industri telah mengubah cara kerja manusia dari penggunaan manual menjadi otomatisasi atau digitalisasi

Revolusi industri 4.0 merupakan fase keempat dari sebuah perjalanan sejarah revolusi industri yang dimulai pada abad ke-18. Menurut Prof. Schwab, dunia mengalami empat gelombang revolusi industri. Revolusi industri 1.0 ditandai dengan penemuan mesin uap untuk mendukung mesin produksi, kereta api, dan kapal layar.

Berbagai peralatan kerja yang semula bergantung pada tenaga manusia dan hewan kemudian digantikan dengan mesin uap. Revolusi industri ini juga menimbulkan dampak negatif dalam bentuk pengangguran massal.

Ditemukan energi listrik dan konsep pembagian tenaga kerja untuk menghasilkan produksi dalam jumlah besar pada awal abad 19 telah menandai lahirnya Revolusi Industri 2.0.

Energy listrik telah mendorong para ilmuwan untuk menemukan berbagai teknologi lainnya seperti lampu, mesin telegraf, dan teknologi ban berjalan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat pada awal abad 20 telah melahirkan teknologi informasi dan proses produksi yang dikendalikan secara otomatis. Mesin industri tidak lagi dikendalikan oleh tenaga manusia tetapi menggunakan *Programmable Logic Controller* (PLC) atau sistem otomatisasi berbasis computer. Dampaknya, biaya produksi menjadi semakin murah. Teknologi informasi juga semakin maju diantaranya teknologi kamera yang terintegrasi dengan mobile phone dan semakin berkembangnya industri kreatif di dunia musik dengan ditemukannya file digital.

Revolusi industri mengalami puncaknya saat ini dengan lahirnya teknologi digital yang berdampak masif terhadap hidup manusia di seluruh dunia. Revolusi industri terkini atau generasi keempat mendorong sistem otomatisasi di dalam semua proses aktivitas. Teknologi internet yang semakin masif tidak hanya menghubungkan jutaan manusia di seluruh dunia, tetapi juga telah menjadi basis bagi transaksi perdagangan dan transportasi secara onlinen (Ahmad Yusril Wafi, 2019).

Sebagai sebuah proses yang berputar cepat maka dampak revolusi industry tidak langsung menimbulkan disrupsi total, tapi umumnya diawali adanya proses-proses *self disruption*, peristiwa, kasus awal, yang mengandung patologi, hambatan, dan tantangan

Seperti pelapukan pada lambung kapal yang tengah melayari samudera luas memuat ramai penumpang. Menyadari bahaya pelapukan tersebut lalu memantik orang mencatat, menyampaikan inisiasi, kreasi, dan inovasi agar terjadinya perbaikan (*recovery*) atau pergantian pendekatan, cara berpikir, cari bertindak, dari cara-cara lama menjadi pola-pola baru.

Akademisi kampus yang mengemban misi tri dharma senantiasa rajin mencatat, meneliti, mengkritisi, dan memberikan gagasan alternatif atau solusi terhadap sebuah peristiwa, kasus yang menjadi perhatian publik di media massa (baik media lokal, nasional, berbahasa Indonesia dan english, berbasis cetak atau *online*).

Bunga rampai akademisi ini berupaya mencatat, mengkritisi, mengulas aneka dinamika di lingkup pemerintahan dan politik yang terjadi dalam satu dasarwa. Hal itu bisa dilihat pada bagian pertama dinamika pemerintahan dan bagian kedua dinamika politik.

Akademisi sudah mengingatkan sejak dulu hingga saat ini bahwa persaingan antarnegara (terutama elemen aparat, bisnis, kampus, dan warga) itu berfokus melakukan persaingan kreativitas dan inovasi. Resep agar bersaing menciptakan sumber daya yang kreatif dan inovatif ini distimulan dari hasil riset world bank (1995) terhadap 150 negara di dunia bahwa keunggulan sebuah negara ditentukan dari kontribusi natural resources (10%), technology (20%), networking (25%), dan kontribusi yang terbesar adalah kemampuan sumber daya bangsa menciptakan *innovation& creativity* (45%). Jumlah penduduk yang banyak dan sumber daya alam melimpah makin disadari apabila bila salah kelola tanpa *value added* maka bangsa tersebut siap-siap menjadi bangsa pinggiran.

Sayangnya upaya merintis inovasi-inovasi di daerah dan nusantara dihadapkan pada 5 (lima) anomali atau problem besar yakni (1) korupsi yang mendera dan tidak ada kapoknya meski berkali terjadi OTT KPK; (2) ada upaya menarik birokrasi dari sudut netral ke berpihak kepada kandidat atau incumben ini tentu mengganggu profesionalitas dan kinerja birokrat; (3) pimpinan daerah hasil pilkada sulit diharapkan jadi agen penggerak inovasi karena sebagian kakinya terikat oleh pemodal yang biayai kontestasi pilkada yang mahal (*high cost politic*); (4)

swasta (pasar) dibantu media kadang mengambil alih peran instansi pemerintah yang gaptেক (gagap teknologi) dan lembaga sampiran negara yang lelet. Pasar misalnya memotong red type lewat aksi *live quick count*, dan biro jasa pengurusan administrasi publik; (5) masih banyak pembangunan diskontinu atau dilanjutkan setengah hati oleh elite penerus. Ganti pemimpin, maka gantilah kebijakan.

Alhamdulillah, generasi milenial sebagai gerbong depan bonus demografi era mendatang (era Indonesia emas) merasakan disrupsi pemerintahan dan politik berbasis teknologi 4.0. di nusantara baru langkah awal dari undakan tangga yang banyak dan tinggi. Para milenial optimis—di tengah munculnya pandemi covid-19 di dua pertiga negara dunia sebagai trigger baru disrupsi global—mereka yakin akan sanggup melakukan perubahan yang lebih baik lagi kelak.

Bandar Lampung, April 2020
Salam,

Editor

How to Read This Book

Bunga rampai ini merupakan kumpulan catatan, pemikiran dan kajian multi disiplin, terutama jurusan pemerintahan, administrasi publik, hubungan internasional dan komunikasi. Masih ada perdebatan "dimana batas garis demarkasi internal" tatkala bicara konsepsi pemerintahan maka masuk di dalamnya konsepsi politik. Sebaliknya, tatkala bicara konsepsi politik maka di dalamnya termasuk konsepsi pemerintahan.

Oleh karena itu, buku ini bisa dibaca serial, bisa juga dibaca paralel. Tidak perlu terburu-buru untuk menyelesaikan membaca buku ini sekaligus. Sebab setiap bagian artikel buku ini di bagian pertama dinamika pemerintahan dan di bagian kedua dinamika politik, semua memiliki konteks masing-masing, cita rasa dan kesan yang berbeda, layaknya anda meneguk air zam-zam di pinggir lapangan sepak bola .

Selamat membaca. Merdeka!

Daftar Isi

Pengantar Editor	v
How to Read This Book	x
Daftar Isi	xi

BAGIAN PERTAMA: DINAMIKA PEMERINTAHAN

1. Kemiskinan Lampung dan Minimnya Inovasi Pemerintahan Budi kurniawan	3
2. Deprivasi Relatif Kepemimpinan Daerah Simon S. Hutagalung	12
3. Honorer dalam Pusaran Disrupsi dan Efisiensi Maulana Mukhlis	19
4. Politik Birokrasi dan Rekrutmen CPNS Simon S. Hutagalung	25
5. Kreatifitas dan Inovasi Birokrasi Era 4.0 Syafarudin	29
6. Kepemimpinan dan Inovasi Pemerintahan Maulana Mukhlis	33
7. Reformasi Birokrasi di Simpang Jalan Simon S. Hutagalung	37
8. Terminal Agribisnis Lampung, Apa Kabarmu? Syafarudin	41

9. Diskontinu atau Lanjutkan?	
Syafarudin	46
10. Bad Governance dalam Penarikan BPHTB	
Dedy Hermawan	51
11. Mereview Kebijakan Pembangunan Fly Over di Kota Bandar	
Dedy Hermawan	57
12. Kolaborasi dalam Tata Kelola Bencana	
Maulana Mukhlis	62
13. Alasan Bandarnegara dan Corona	
Syafarudin	69
14. Zona Integritas dan Peringatan Dini Kepala Daerah	
Arizka Warganegara	74
15. Partisipasi Pemilih Versus Administrasi Pemilu	
Robi Cahyadi kurniawan	78
16. Pilkada, Dilema Pilihan Birokrasi	
Simon S. Hutagalung	84
17. Pilkada dan Netralitas Birokrasi	
Maulana Mukhlis	90
18. Kiprah Satu Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK bagi Masyarakat Lampung	
Dedy Hermawan	95
19. Arinal dan Jokowi Milad, Pejabat Beriklan Beretikalah	
Syafarudin	102

BAGIAN KEDUA: DINAMIKA POLITIK

1. Quick Count dan Relevansi Pengaturannya Pada Pilpres : Belajar dari Sejarah Pilpres Ari darmastuti	109
2. Penyesuaian Australia dan Sikap Kita Budi Kurniawan	115
3. Komunikasi Politik di Era Revolusi Industri 4.0 Andy Corry Wardhani	119
4. Masalah Demokrasi Pilgub Lampung 2018 Robi Cahyadi kurniawan	124
5. Pemuda dan Kepemimpinan Pemuda Syamsul Ma'arif	129
6. Perempuan dalam Pemilu 2019 Robi Cahyadi kurniawan	134
7. Media dan Pilkada Robi Cahyadi kurniawan	140
8. Boneka Pilgub dan Cukong Bahayakan Lampung Syafarudin	145
9. Politisi Cai Bucai: KGB, MEOK dan Raja Olah Syafarudin	151
10. Reformasi Elektoral dan Evaluasi Pemilu Lampung Arizka Warganegara	154
11. Demokrasi Kita, Politik Uang dan Caden Arizka Warganegara	158
12. Mengapa KPK Hadir? Budi kurniawan	163
13. Democracy and Corruption in Indonesia Budi kurniawan	167
14. Kabinet Presidensial di Tengah Sistem Multipartai Syamsul Ma'arif	170

15. Seputar Maraknya Wabah Korupsi	
Syamsul Ma'arif	176
16. Budaya Permisif Pemilih	
Robi Cahyadi kurniawan	180
17. Menunggu Pembuktian Diri Bawaslu	
Robi Cahyadi kurniawan	185
18. Korupsi : Diberantas, Dibutuhkan dan Dipelihara?	
Syafarudin	190
Biodata Penulis	194
Biodata Editor	204

Reformasi Elektoral dan Evaluasi Pemilu Lampung

ARIZKA WARGANAGERA / Media Lampost.co / 2019

Boris Johnson Perdana Menteri Petahana Inggris menang besar dan Inggris dengan segera akan keluar dari Uni Eropa, begitulah salah satu judul *headline* sebuah media massa internasional. Boris Johnson sosok kontroversial dalam spektrum politik Britania Raya, sebagai seorang yang berlatar belakang keluarga kelas menengah, mantan Walikota London ini begitu terasa kontroversial sebab Boris-lah salah satu tokoh yang mendorong Inggris keluar dari Uni Eropa.

Nun jauh di seberang atlantik sana saudara muda Amerika Serikat pun mengalami gonjang-ganjing politik yang luar biasa, tokoh kontroversial lainnya Donald Trump mendapat *impeachment* (mosi tidak percaya) dari Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat. Pada bagian lain Spanyol, Chili, India terutama paska keluarnya undang-undang mengenai Kewarganegaraan (*citizenship bill*) juga mengalami hal yang sama *riot* dan instabilitas politik termasuk juga persoalan warga Uighur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok juga mengalami kondisi yang sama penuh dengan dinamika dan kontroversi.

Dunia politik tidak pernah lepas dari kontroversi, perdebatan dan perebutan kuasa. Dan dunia hari ini memang sedang berhadapan atas ketidakpastian politik dan tentunya juga

turbulensi resesi ekonomi global yang akan segera kita hadapi pada tahun 2020.

Pertanyaannya apakah kita semua sudah siap dengan ini semua perubahan global ini? Dalam konteks nasional, termasuk ketidak-pastian posisi negara soal keberlangsungan Pilkada secara langsung (Pilkadasung). Pada awalnya kita sangat mendukung Pilkadasung. Jikalau kita evaluasi Pilkadasung bagus diawal saja antara kurun waktu tahun 2005 dan 2010, setelahnya politik menjadi sangat *high cost* dengan prevalensi politik uang yang sangat tinggi hampir disemua wilayah Indonesia.

Desk *evaluation* kami misalkan mendorong sebuah reformasi elektoral segera diwujudkan. Pada saat ini, yang menjadi *concern* kita bersama adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat melalui sistem demokrasi yang sehat.

Oleh sebab itu jika sistem Pemilihan Umum kita anut dan pakai baik itu di level Pileg, Pilkada dan Pilpres tidak berdampak pada gejala membaiknya kesejahteraan rakyat atau justru sebaliknya ada semacam kekacauan "messy" ekonomi dan politik ditengah masyarakat. Sistem demokrasi yang dianut mestilah menjadi bagian yang di evaluasi.

Kita misalkan dapat mengusulkan kombinasi sistem pemilu. Kepala daerah kabupaten dan kota dapat saja dipilih kembali melalui DPRD dan Gubernur ditunjuk langsung oleh Presiden. Pemilihan anggota legislatif DPR RI dan DPRD tetap dipilih secara langsung akan tetapi sistem pemilihan kembali pada sistem proporsional tertutup, rakyat cukup memilih partai saja bukan nama caleg sehingga mekanisme internal partai bisa berjalan dan lompat pagar elit dari satu partai ke partai lain bisa dikurangi.

Satu simulasi kami lakukan dalam kelas mata kuliah Analisis Politik Indonesia, dengan memberikan pertanyaan kepada para mahasiswa, apakah ide anda menyoal reformasi elektoral di Indonesia? jawaban para mahasiswa pun beragam walau pada umumnya mereka tetap mendukung Pilkadasung akan tetapi pada

bagian lain tidak menutup opsi untuk Pilkada via DPRD dengan pengawasan ketat.

Reformasi politik yang sudah berjalan lebih dari 20 tahun serta sistem Pilkada yang hampir 15 tahun ini dalam konteks kekinian seharusnya segera di evaluasi. Usul mengenai mendorong Pilkada *via* DPRD kembali bisa menjadi alternatif. Banyak hal yang harus dievaluasi misalkan dampak Pilkada yang terhadap politik berbasis *high cost* dan secara akademik ini akan berdampak pada berkembangnya *capitalist elite/elit* kapitalis yang akan mengkooptasi logika kesejahteraan rakyat.

Setelah berjalan 15 tahun, harus diakui memang infra dan suprastruktur politik kita belumlah matang dan siap. Dimulai dari rendahnya tingkat pendidikan, pendapatan, sistem komunalisme yang secara derivatif memunculkan nepotisme dan kolusi politik serta budaya politik paternalistik tidaklah 100% cocok dengan model demokrasi yang sangat liberal.

Refleksi

Dan sebelum sebelum *grand design* reformasi elektoral terlaksana, dalam konteks Lampung setelah mengamati perjalanan politik dalam 1 (satu) tahun terakhir terdapat beberapa hal evaluasi Pemilu.

Pertama, dalam konteks penyelenggara. Kita mendorong profesionalitas penyelenggara pemilu mesti ditingkatkan terutama pada level badan penyelenggaraan pemilu yang dibuat AD HOC, kita menemukan misalkan masih banyak sekali petugas KPPS yang masih belum paham berbuat apa ketika ditemukan *disputes* pemilu termasuk juga kelelahan dalam mengorganisir Pemilu 2019 lalu. Dalam konteks lain, tiga serangkai, KPU, PPK dan KPPS sebenarnya juga sangat berperan dalam peningkatan partisipasi pemilu dalam setiap *event* pemilihan umum. Angka partisipasi Pemilu 2019 atau *voter turn out* di Provinsi Lampung mencapai angka 80,60% untuk Pilres dan 80,50% untuk DPR.

Dan angka ini meningkat dengan cukup signifikan, terdapat beberapa dugaan faktor yang meningkatkan angka partisipasi politik tersebut antara lain faktor money politics, kontestasi dua pasangan capres Jokowi dan Prabowo serta keberhasilan penyelenggara melakukan sosialisasi pemilu.

Kedua, dalam konteks pemilih. Menjadi *concern* bersama adalah soal prevalensi politik uang dan menjadi pekerjaan rumah yang berat. Mereduksi potensi prevalensi politik uang disaat yang bersamaan pendapatan per kapita warga masih dalam level yang relatif rendah. Kajian mantan Wakil Presiden Boediono tahun 2006 menyatakan bahwa ambang batas GDP per kapita \$6000 akan membuat demokrasi kita berjalan dengan baik perlu untuk dikaji lebih lanjut mengingat prevalensi politik uang semakin meninggi.

Ketiga, dalam konteks peserta. Ini menjadi lebih kompleks, *problem* kegagalan institusionalisasi partai politik menjadikan kompetisi di ranah elite tidak berjalan semestinya. Visi, misi dan platform politik menjadi hal yang dikesampingkan dibandingkan dengan logistik politik. Dan ini membuat sistem politik semakin mengarah pada persaingan elite kapital ketimbang substansi.

Pada akhirnya, demokratisasi adalah sebuah momen proses coba dan salah, evaluasi setiap kegagalan pemilu mesti menjadi *concern* bersama pada tahun pelaksanaan pemilu selanjutnya. Hanya saja apakah kita serius melakukan evaluasi setiap akhir pemilu atau hal tersebut hanya rutinitas saja?

Biodata Penulis



ARIZKA WARGANEGARA, Ph.D. lahir di Metro 20 Juni 1981 mengabdikan sebagai Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, alumnus Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung tahun 2003 dan Master of Arts dalam bidang Ilmu Politik Universitas Kebangsaan Malaysia tahun 2005. Menyelesaikan Doctor of Philosophy dalam bidang Political Geography di University of Leeds, Inggris Raya tahun 2019.

Pada tahun 2002 penulis tercatat sebagai Mahasiswa Berprestasi Utama I Universitas Lampung dan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional. Kolumnis Jakarta Globe dan Media Indonesia ini pernah menjabat sebagai Direktur Lembaga Kajian Politik, Publik dan Demokrasi KAHMI wilayah Lampung dan aktif sebagai Pengurus Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Inggris Raya.

Pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Lampung. Pada tahun 2015, bersama beberapa pelajar Indonesia yang sedang studi di Inggris Raya mendirikan Lingkar Studi Cendekia, United Kingdom (LSC-UK), sebuah lembaga think tank yang bertujuan memberikan kontribusi pemikiran bagi peradaban Indonesia.

Beberapa paper dipresentasikan pada Konferensi ASEASUK SOAS University of London tahun 2016, ASEASUK Seminar di University of York tahun 2018, Sustain Kyoto Conference Jepang tahun 2013 dan beberapa konferensi di Universitas Kebangsaan Malaysia.